

**PERANAN KETERANGAN SAKSI A *CHARGE* SEBAGAI SALAH SATU
ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI



Oleh:

YOHENDA TRI A.
NPM.0671010082

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala KaruniaNya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Peranan Keterangan Saksi A Charge Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana”***.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, M.P. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Bapak Sutrisno S.H., M.Hum. selaku Pudek I dan Dosen Wali yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Bapak Subani, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Bapak Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan pengarahan dan dukungan selama Penyusunan skripsi;
6. Ibu Mas Anienda TF., SH., MH. selaku Dosen Pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

7. Kedua orang tua yang selalu memberi semangat tanpa henti dan telah mendukung secara moril maupun materiil;
8. Teman-teman seperjuangan, Muhammad Rois, H. Misbahul Munir, Yudi Prasetyo, Aseptya Nur Achmad, Sigit Priyambodo, serta segenap dosen, staff juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang tidak kami sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa skripsi ini akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Surabaya, 6
Penulis

Yohenda Tri. A
NPM. 0671010082

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS KUKUM**

Nama Mahasiswa : Yohenda Tri A.
NPM : 0671010082
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/ 2 Februari 1988
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**PERANAN KETERANGAN SAKSI *A CHARGE* SEBAGAI SALAH SATU
ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA**

ABSTRAKSI

Saksi *A Charge* merupakan salah satu alat bukti yang utama di dalam pembuktian peradilan pidana. Dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana alat bukti yang pertama kali di periksa adalah saksi *A Charge*. Mengingat peranan dan Fungsinya yang sangat penting maka pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi *A Charge* dan memberikan perlindungan yang sebagaimana telah di atur di dalam Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban dan hak-hak saksi *A Charge* dalam peradilan pidana menjadikan sejumlah rumusan masalah yakni pertama, bagaimanakah peranan saksi *A Charge* dalam proses peradilan pidana, dan yang kedua adalah bagaimanakah perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan pidana. Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa peranan saksi *A Charge* dalam proses pembuktian sangat penting, Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi *A Charge*. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu di dasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi *A Charge* sekurang-kurangnya di samping pembuktian yang lain, masih selalu di perlukan pembuktian dengan alat bukti dengan keterangan saksi *A Charge*. Seyogyanya perlindungan-perlindungan hukum bagi saksi *A Charge* di perlukan untuk melindungi hak-hak individunya. Tetapi dalam Penegakan hukum dalam perlindungan saksi *A Charge*, seringkali tidak mendapat perlindungan hukum dan bahkan malah dijadikan tersangka. Dengan demikian perlunya kebijakan hukum tetang perlindungan saksi *A Charge* dimasa yang akan datang diperlukan harmonisasi hukum baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dalam satu sistem hukum, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hukum dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan pedoman dalam menjalankan perlindungan saksi *A Charge*.

Kata Kunci: *Saksi A Charge, Pemeriksaan Saksi A Charge, Perlindungan Saksi A Charge.*

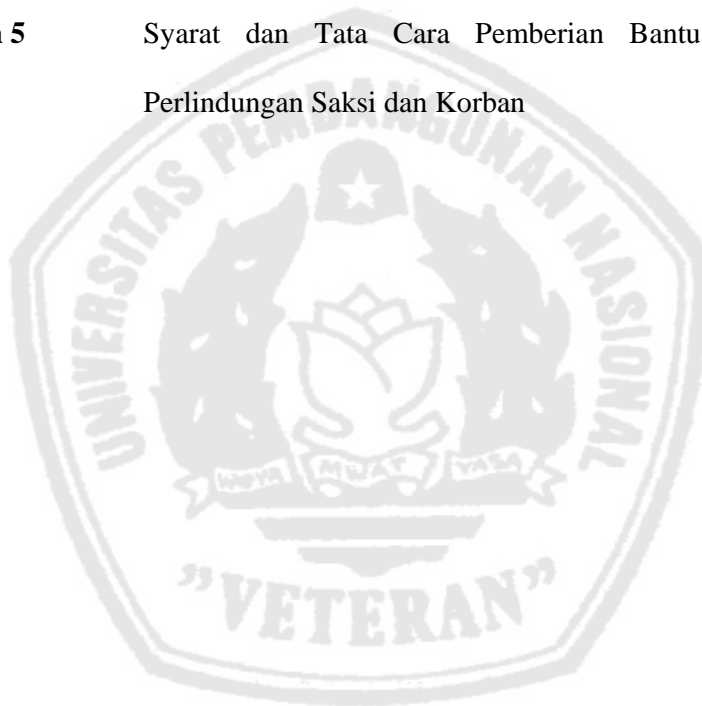
DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Kajian Pustaka	5
1.5.1 Alat Bukti	5
1.5.2 Definisi Saksi	6
1.5.3 Sistem Pembuktian	8
1.5.4 Proses Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan	12
1.6 Metode Penelitian	17
1.6.1 Jenis Penelitian	17
1.6.2 Sumber Data	17
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	19
1.6.4 Metode Analisa Data	19
1.7 Sistematika Penulisan	20

BAB II PERANAN SAKSI A <i>CHARGE</i> DALAM PERADILAN PIDANA.....	22
2.1 Keterangan Saksi A <i>Charge</i> yang Bernilai Alat Bukti	22
2.2 Kedudukan Saksi A <i>Charge</i> Dalam Proses Peradilan Pidana	28
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI A <i>CHARGE</i> DALAM PROSES PERADILAN PIDANA	36
3.1 Pelaksanaan Perlindungan Saksi A <i>Charge</i>	36
3.2 Lembaga Perlindungan Saksi	46
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jadual Penelitian
Lampiran 2	Daftar Biaya Penelitian
Lampiran 3	Perlindungan Saksi dan Korban
Lampiran 4	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Lampiran 5	Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Perlindungan Saksi dan Korban



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang. Dengan demikian, mereka merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliputi rasa takut. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati, mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai Warga Negara terutama demi tegaknya hukum. Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.²

¹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, Hlm. 227

² Resti Siti Aningsih, *Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 1

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.³

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Kesadaran orang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum. Sebaliknya, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk datang

³ Sabto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, 2008. hlm. 12

sebagai saksi sedangkan ia telah dipanggil secara sah menurut Undang-Undang itu adalah Pasal 224 KUHP.⁴ adapun perumusannya adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi atau kewajiban yang menurut Undang-Undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dalam pasal 184-185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya, urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting maka Pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi dan memberikan perlindungan khusus terhadap saksi tersebut yang diatur, dijamin dan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.⁵

⁴ Op.Cit, hlm. 82

⁵ Ibit, hlm. 13

Hal-hal yang esensial terhadap perlindungan hukum terhadap saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian mereka telah secara sadar dan suka rela bersedia menjadi seorang saksi dalam suatu perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut, maka mereka telah mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum.⁶

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan saksi *A Charge* dalam proses peradilan pidana ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian penelitian :

1. Untuk mengetahui peranan saksi *A Charge* dalam proses peradilan Pidana.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi mereka yang memberikan keterangan saksi.

⁶ Resti Siti Aningsih., Op.Cit., hlm 4

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembangunan Hukum, Khususnya dalam peranan dan kewajiban serta hak-hak saksi dalam Peradilan pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai sarana pengetahuan umum kepada masyarakat yang di panggil sebagai saksi di pengadilan, sehingga dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan tentang peranan keterangan saksi dalam pembuktian tindak pidana.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Alat bukti

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan di dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau biasanya di sebutkan satu saksi bukan saksi (*Unus testis nulis testis*). Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi

pidana baik denda maupun penjara.⁷ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membatasi bahwa alat bukti yang sah diantaranya ialah:

1. keterangan saksi.
2. keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. keterangan terdakwa.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁸

1.5.2 Definisi Saksi

Saksi menurut Undang – Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.⁹ Dalam hal ini yang dapat memberikan keterangan di dalam Peradilan Pidana yaitu :

⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 19

⁸ Sabto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang. 2008. Hlm. 12

⁹ Andi Hamzah. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm.162.

1. Saksi *A De Charge* adalah saksi yang diajukan Terdakwa, dengan harapan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri.
2. Saksi *A Charge* adalah saksi yang memberatkan Terdakwa, biasanya saksi ini merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau yang diajukan Penuntut Umum.
3. Saksi *De Auditu* adalah saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain. Saksi ini hanya untuk memperkuat keterangan dari saksi korban.
4. Saksi Ahli adalah Saksi ini tidak memihak kepada siapapun karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi bidang tugasnya, Kehadiran saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.

Syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi *A Charge* dapat dikatakan sah adalah :

1. Syarat formil :
 - a. Seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP)
 - b. Seorang saksi telah mencapai usia dewasa yang telah mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sudah menikah. Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum menikah

dapat memberikan keterangan tanpa disumpah dan di anggap sebagai keterangan biasa (pasal 171 butir a KUHAP).

2. Syarat materil

- a. Melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (pasal 1 butir 26 atau 27 KUHAP).
- b. Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP).
- c. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa/ asas ini terkenal dengan sebutan *unus testis nullus tertis* (pasal 185 ayat (2) KUHAP)¹⁰

1.5.3 Sistem Pembuktian

Hukum pidana menganut sistem pembuktian *Negative wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat :

- a. *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. *Negatif*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.¹¹

Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab akibat). Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di sebut KUHAP) mensyaratkan

¹⁰ Ibit, hlm. 297-301

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, Loc.Cit, hlm. 13

adanya dua alat bukti yang sah dan yang ditetapkan Undang-Undang dan keyakinan hakim, bahwa tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sehingga meskipun terdapat empat, lima atau enam saksi yang diajukan Penuntut Umum, akan tetapi hakim pidana tidak meyakini bahwa tindakan pidana itu telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, maka hakim pidana akan membebaskan terdakwa atau akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, sistem KUHAP menganut sistem *Negative wettelijk*, tidak mengizinkan hakim pidana untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak ditetapkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini yang ditetapkan oleh pasal 184 KUHAP.¹² Alat bukti berupa pengetahuan hakim atau keyakinan hakim tidak merupakan alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 184 yang menyatakan Alat bukti yang sah Yaitu :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Asas *Negatif Wettelijk* tercermin pula secara nyata pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP, bahwa berdasarkan “pengakuan salah yang diucapkan terdakwa”, hakim tidak boleh menghukum terdakwa. “pengakuan salah yang diucapkan terdakwa” tanpa alat bukti lain, merupakan alat pembuktian yang tidak lengkap

¹² Ibit, hlm. 14

(*onvoldoende bewijs*).¹³ Untuk lebih jelasnya pasal 189 ayat (4), dikutip sebagai berikut :

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Walaupun hakim yakin, bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, akan tetapi keyakinan hakim ini hanya dilandaskan oleh satu alat bukti yang berupa keterangan terdakwa, maka putusan demikian merupakan tindakan yang melanggar asas dari pada bukti minimum yang di minta oleh Undang-Undang (*de leer van het minimum bewijs*) sebagaimana termuat di dalam 183 KUHAP.¹⁴

Adalah lain halnya ajaran pembuktian yang dikenal dengan *Conviction Intime*. Ajaran ini disandarkan semata-mata atas keyakinan belaka, dan tidak terikat kepada aturan-aturan, hingga keyakinan menurut aliran ini sangat subjektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. System ini tidak dianut dalam peradilan umum atau tidak dianut dalam KUHAP. Contoh dari sestem ini dipergunakan dalam peradilan yuri.

Lain lagi ajaran pembuktian yang dikenal dengan *Positif Wettelijk*. Ajaran ini didasarkan semata-mata kepada alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menentukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tanpa adanya keyakinan hakim.

¹³ Ibit, hlm. 15

¹⁴ Ibit, hlm. 16

Dengan demikian misalnya jika peraturan menetapkan, bahwa dalam pembuktian dipergunakan dua alat bukti saja, sudah cukup untuk menentukan apakah kesalahan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka hakim harus menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, tanpa adanya unsure keyakinan hakim. Contoh: dalam suatu kasus perkara pidana telah diperiksa dua orang saksi yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pidana, maka hakim mesti menghukum terdakwa, meskipun ia tidak yakin. Ajaran ini hanya dipergunakan dalam hokum acara perdata

Ada ajaran yang hampir-hampir mirip dengan ajaran *Negatif Wittelijk*, yaitu yang dikenal dengan *Conviction Raisonee*. Ajaran ini disandarkan semata-mata atas keyakinan atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang diluar ketentuan perUndang-Undangan.

Hakekat pembuktian ialah mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi hakim akan kebenaran peristiwa tersebut. Sengketa perdata dibawa kepersidangan dengan maksud untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, sedangkan perkara pidana dibawa ke persidangan dengan maksud untuk memperoleh keputusan yang setimpal atas perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara pembuktian dalam perkara perdata dan dalam perkara pidana, di mana unsur keyakinan

hakim dipersyaratkan bagi perkara pidana dan dalam perkara perdata tidak disebut sebagai syarat akan adanya keyakinan hakim itu.

1.5.4 Proses Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan

Tata cara pemeriksaan saksi menurut KUHAP :

1. Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa.
2. Petugas membawa saksi masuk keruang sidang dan mempersilakan saksi duduk di kursi pemeriksaan.
3. Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:
 - a. Identitas saksi seperti; nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dan lain-lain.
 - b. Apakah saksi kenal dengan terdakwa; apabila perlu hakim dapat meminta saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna memastikan jawabannya.
 - c. Apakah saksi memiliki hubungan darah; sampai derajat berapa dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa, atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
4. Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan siap diperiksa sebagai saksi.
5. Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama/keyakinannya.

6. Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya. Lafal sumpah dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh petugas juru sumpah.
7. Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer adalah:
 - a. Saksi dipersilakan berdiri agak tegak ke depan.
 - b. Untuk saksi yang beragama Islam, cukup berdiri tegak. Pada saat melafalkan sumpah; petugas berdiri dibelakang saksi dan mengangkat Alquran diatas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama Kristen/Katolik petugas membawakan Injil (Alkitab) disebelah kiri saksi. Pada saat saksi melafalkan sumpah/janji, tangan kiri saksi diletakkan di atas Alkitab dan tangan kanan saksi diangkat dan jari tengah jari telunjuk membentuk huruf "V" (victoria) untuk yang bergama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang bergama Katolik. Sedangkan untuk agama lainnya lagi, menyesuaikan.
 - c. Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang diucapkan oleh hakim.
 - d. Lafal sumpah saksi adalah sebagai berikut: *"saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya"*.

- e. Untuk saksi yang beragama Islam, lafal sumpah tersebut diawali dengan ucapan/kata: "*Wallahi...*" atau "*Demi Allah...*", untuk saksi yang beragama Katholik/Kristen Protestan lafal sumpah (janji) tersebut diakhiri dengan ucapan/kata, "*...Semoga Tuhan menolong saya*". Untuk saksi yang beragama Hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan/kata, "*Om atah Parama Wisesa ...*", untuk saksi yang bergama Budha lafal sumpah diawali dengan ucapan/kata "*Demi sang Hyang Adi Budha...*"
8. Hakim ketua mempersilakan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya sendiri. Jika perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.
9. Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi. Adapun urutan kesempatan tersebut adalah: pertama hakim ketua memberi kesempatan pada hakim anggota I untuk bertanya pada saksi. Setelah itu, kesempatan diberikan pada hakim anggota II. Selanjutnya, pada

penuntut umum, dan yang terakhir kesempatan diberikan pada terdakwa atau penasihat hukum.

10. Pertanyaan yang diajukan pada saksi diarahkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.
- b. Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan penyampainnya harus dipahami oleh saksi.
- c. Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi.
- d. Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasian delik.
- e. Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan dalam rangka memberi penekanan terhadap suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu. Hal-hal tersebut diatas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila dalam pemeriksaan saksi, hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan "keberatan/interupsi" pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya. Sebagai contoh pertanyaan penuntut umum bersifat menjerat terdakwa maka penasihat hukum dapat protes, kata-katanya kira-kira sebagai berikut: *"interupsi ketua majelis...*

pertanyaan penuntut umum menjerat saksi". Satu contoh lagi, jika pertanyaan penasihat hukum berbelit-belit maka penuntut umum dapat mengajukan protes, misalnya dengan katakata: *"keberatan ketua majelis... pertanyaan penasihat hukum membingungkan saksi"*. Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan menetapkan bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi/keberatan ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan pertanyaannya, sebaliknya apabila interupsi/keberatan diterima, maka pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan yang lain.

11. Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
12. Setiap saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.¹⁵

¹⁵ Nico Ngani, *Pidana dan pembedaan*, Cetakan III, Yogyakarta, 1998, hlm. 17-19

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bagaimana peranan serta kewajiban dan hak-hak saksi dalam peradilan pidana. Bertalian dengan rumusan masalah yang dikaji, dan hukum sebagai kaidah atau norma, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *hukum normatif* yang fokusnya adalah hukum positif. Dalam pengertian lain sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*leberary research*) dengan pustaka utamanya adalah peraturan perUndang-Undangan.¹⁶

1.6.2 Sumber Data

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian pada pokok intinya dilakukan dengan melalui studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini di dapat dari :

- a. *Data Sekunder* : yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. *Data Primer* : data yang diambil langsung dari lapangan yakni mengamati proses persidangan pidana yang menghadirkan saksi *A Charge*.

Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum yang diperoleh Dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-Undangan yang di pakai dalam sripsi ini terdiri dari :

¹⁶ Sarjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983, h. 13

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 2 Tahun 2010 Tentang Standar Oprasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompetensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah, dan hasil seminar-seminar hukum. Literatur yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari :

1. Pengantar Hukum Acara Pidana.
2. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.
3. Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti.
4. Penyelidikan dan Penyidikan.
5. Pidana dan Pemidanaan.
6. Hukum Acara Pidana Indonesia.
7. Fungsi dan kedudukan saksi dalam peradilan Pidana.

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Adapun petunjuk yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari :

1. Kamus Bahasa Indonesia.
2. Kamus Hukum.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Data sekunder adalah : Bahan-bahan hukum (legal material) yang diperoleh dari Perundang-Undangan, putusan Hakim ataupun Ensiklopedi selanjutnya dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang ditentukan secara universal, cermat, tepat dan ketat sesuai dengan pokok masalah. Langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut yang hasilnya lalu ditulis dengan menggunakan sistem kartu (*card system*).

Data Primer : Bahan-bahan Hukum yang diperoleh dari lapangan melalui Observasi/melihat langsung proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri Surabaya Pada Tanggal 19 Januari 2011 yang menghadirkan saksi *A Charge*.

1.6.4 Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah ditulis dengan menggunakan sistem kartu dilakukan pengolahan dengan menyusun dan mengklasifikasikan secara sistematis dan kuantitatif sesuai dengan pokok bahasannya dan selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis.

Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pengkajian *deduksi deskriptif*. Metode berpikir deduksi adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Pengkajian deskriptif analitik adalah untuk menelaah konsep-konsep yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini sangat berkaitan dengan tugas ilmu hukum normatif (dogmatik) yaitu untuk menelaah, mensistemasi, menginterpretasikan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku bagi pengkajian tentang pokok masalah.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa subbab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab I, Pendahuluan. Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian Kajian Pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan

masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan tentang peranan saksi *A Charge* dalam Peradilan pidana. Secara umum dalam bab ini terdapat Dua subbab, yakni yang pertama mengenai Keterangan Saksi *A Charge* Yang Bernilai Alat Bukti dan subbab yang kedua adalah mengenai Kedudukan Saksi *A Charge* Dalam Proses Peradilan Pidana.

Bab III, menguraikan tentang Perlindungan Hukum Saksi *A Charge* Dalam Proses Pradilan Pidana. Bab ini terdiri dari Dua subbab, yang pertama adalah Pelaksanaan Perlindungan Saksi *A Charge*, dan subbab yang kedua adalah Lembaga Perlindungan Saksi.

Bab IV, Berdasarkan uraian-uraian dalam bab II dan bab III diatas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan obyek penulisan, selanjutnya ditarik Kesimpulan dan Saran dalam bab IV sebagai penutup.